

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran aktif dari pemerintah yang sangat serius untuk menangani gelandangan psikotik sangat membantu bagi masyarakat DIY, keseriusan pemerintah dalam pembinaan dan penanggulangan gelandangan psikotik dengan adanya pengaturan Pasal 7 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Psikotik yakni adanya upaya Prefentif, Koersif, Rehabitasi dan Reintegrasi Sosial sebagai pelaksanaanya adalah Dinas Sosial yang membawahi *Camp Assasment* dan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Unit Bina Laras, Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian dan Dinas Kesehatan. Keberhasilan peningkatan dalam pelaksanaan program dilihat dari jumlah klien psikotik masuk dengan jumlah klien psikotik tertangani dari tahun 2014 sampai dengan 2018 antara klien yang masuk dengan klien yang tertangani sangat jauh perbandingannya. Di lihat dari totalnya belum ada setengahnya dari jumlah klien yang masuk dapat tertangani, dari data Camp Assessment yang keberlanjutan rehabilitasinya di lakukan oleh Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras. Untuk klien yang berada di Balai Rehabilitasi Unit laras dilihat dari tahun 2017 sampai dengan 2018 hanya tedapat 140 klien dari gelandangan psikotik dan yang tertangani dari tahun 2017 hanya 12 orang dan di tahu 2018 20 orang, ini berarti jumlahnya hanya 24 klien yang dapat tertangani dan dapat di kembalikan. Dengan

data tersebut ini berarti bahwa tugas pemerintah untuk segera melakukan peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan dan pelayanan program, peningkatan kemampuan pelaksanaan program penanganan gelandangan psikotik merupakan cerminan tercapainya tujuan dari pemerintah DIY itu sendiri.

2. Hambatang yang di Hadapi Pemerintah DIY dalam Melaksanakan Pembinaan dan Penanggulangan Gelandangan Psikotik:
 - a. Dari aspek hukum, tidak ada hambatan terkait adanya pasal demi pasal yang tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembinaan Gelandangan dan Penegemis justru sangat membatu untuk terciptanya DIY yang bersih aman dan nyaman.
 - b. Dari aspek kelembagaan, kurangnya aturan proses *Reckruitment* pegawai yang teratur dan efektif, sehingga menjadi penyebab dlam kualitas dan keterbatasan SDM baik dalam *Camp Assessment* dan Balai Rehabilitasi Sosial Bila Karya dan Laras di Unit Bina laras
 - c. Dari aspek aparat hukum, yakni dari Satuan Polisi Pamong Praja perlunya tenaga, kemampuan, kehati-hatian yang lebih dalam melakukan penjaringan atau penjangkauan terhadap gelandangan psikotik karena memiliki emosi yang tidak stabil.
 - d. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dengan masih adanya diskriminasi sosial bagi penderita psikotik, dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam memberikan pendampingan lanjutan, sehingga

menjadi salah satu factor klien untuk kembali menjadi penderita psikotik

- e. Sarana dan prasarana di *Camp Assessment* maupun di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Unit Bina Laras masih sangat kurang dengan tidak adanya cctv, bangun pagar tembok yang kurang kokoh, kurangnya ruang untuk rehabilitasi lanjutan, dan fasilitas yang tidak sesuai karena bangunan yang di gunakan merupakan bekas rahabilitasi bagi penderita NAPZA.

B. Saran

Untuk dapat meningkatkan pembinaan dan penanganan gelandangan psikotik dapat menggunakan SWOT, SWOT adalah metode perencanaan strategis yang di gunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan ancaman (Treats) dari analisis tersebut diatas akan menghasilkan 4 macam strategi yaitu S-O, S-T, W-O dan W-T:

1. Strategi S-O

- a. Peningkatan pelayanan Balai melalui kerjasama berbagai sektor (swasta maupun dinas lain)
- b. Peningkatan peran masing-masing *stakeholder* (dinas, balia, rumah sakit, Satuan Polisi Pamong Praja) untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta bersih dari gelandangan psikotik.

2. Strategi S-T

- a. Peningkatan arus koordinasi antara berbagai *stakeholder*

- b. Peningkatan keasadaran dan peran serta masyarakat oleh dinas sosial dalam mengubah pandangan mereka terhadap gelandangan psikotik
3. Strategi W-O
- a. Peningkatan kuantitas SDM di Camp Assessment dan Balai Rehabilitasi
 - b. Peningkatan kerjasama antar bebrbagai sector usaha untuk mengatasi minimnya dana
4. Strategi W-T
- Peningkatan peran Balai rehabilitasi melalui peningkatan pemberian keterampilan kepada gelandangan psikotik⁵¹

⁵¹ Intan, dkk, 2012, Strategi Penanganan Gelandangan di Kota Semarang, *Journal of Public Policy and Management Review* Vol.1, No. 1